

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini telah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembangunan di daerahnya melalui otonomi daerah. Adanya pelaksanaan otonomi daerah, maka daerah otonom memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu wewenang tersebut adalah dalam hal keuangan daerah dimana berdasarkan undang-undang No. 33 Tahun 2004 keuangan daerah adalah kewenangan dan kemampuan daerah dalam menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah serta dari Provinsi ke Kabupaten/Kota yang merupakan prasyarat dalam sistem pemerintahan daerah. Kemampuan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat menjadi tolak ukur kemandirian suatu daerah (Andhalia Liza Marie, 2020).

Pemerintah daerah harus mampu menghimpun dana sebanyak-banyaknya agar mencapai pembangunan yang berkelanjutan, salah satu sumber penerimaan daerah yang harus dioptimalkan perannya adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Lusiana *et. Al.*, 2021) menjelaskan apabila banyaknya kebutuhan suatu daerah bisa didanai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka taraf kualitas otonomi daerah tersebut diakui tinggi, serta bidang keuangan daerahnya dapat dikatakan semakin mandiri. Maka dari itu dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu daerah yang

memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi dapat menggunakan pendapatan tersebut untuk pembangunan agar daerah tersebut maju dan berkembang.

Salah satu sektor ekonomi yang digunakan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah dengan mengembangkan sektor pariwisata. Keberadaan sektor pariwisata merupakan suatu potensi untuk dapat dikembangkan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap sarana hiburan atau sarana rekreasi. Untuk itu dibutuhkan pengembangan pada sektor pariwisata. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Chistie & Crompton, 2003) bahwasannya “Pariwisata dapat menjadi alat pembangunan yang ampuh, menghasilkan pertumbuhan ekonomi, mendiversifikasi ekonomi, berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan, dan juga menciptakan keterkaitan ke belakang dan ke depan dengan sektor produksi dan jasa lainnya”. Pernyataan ini menyatakan bahwa pariwisata sebagai sektor yang potensial untuk dikembangkan dan mendukung pengembangan ekonomi. Keberadaan pariwisata akan mampu meningkatkan pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat dengan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar lokasi wisata (Noor dkk, 2021).

Sektor pariwisata merupakan salah satu potensi sumber daya yang cukup menjanjikan untuk sumber pendapatan daerah karena dengan adanya sektor pariwisata tentu akan mendatangkan berbagai dampak di berbagai segi antara lain dampak lingkungan, sosial, budaya dan dampak ekonomi. Dari segi ekonomi adanya pariwisata membawa berbagai macam dampak meliputi dampak langsung, dampak tidak langsung dan dampak lanjutan. Dampak langsungnya adalah bagi

pekerja di kawasan wisata tersebut termasuk pemerintah daerah dan dampak tidak langsung salah satunya yaitu bisa berupa meningkatnya permintaan akan transportasi umum publik dan dampak berkelanjutan tentu berhubungan dengan pemerintah dan masyarakat yang bekerja di bidang pariwisata atau pun tidak secara langsung tetapi mendapatkan dampak positifnya.

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya, nyata, dan bertanggungjawab kepada pemerintah secara proporsional. Dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri, tentu saja daerah memerlukan biaya yang cukup besar guna membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah. Oleh karena itu daerah diberi hak dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerahnya sendiri (Fifi Nurainina, 2022).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber paling penting dalam urusan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mencerminkan kemandirian suatu daerah tersebut. Akan tetapi, faktanya bantuan dari pemerintah pusat masih menjadi sandaran bagi banyak daerah. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa daerah yang tidak menyadari akan sebuah potensi dari sektor-sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga tidak menjadikan daerah mereka sebagai daerah potensial sumber Pendaptan Asli Daerah (Lusiana *et al.*, 2021).

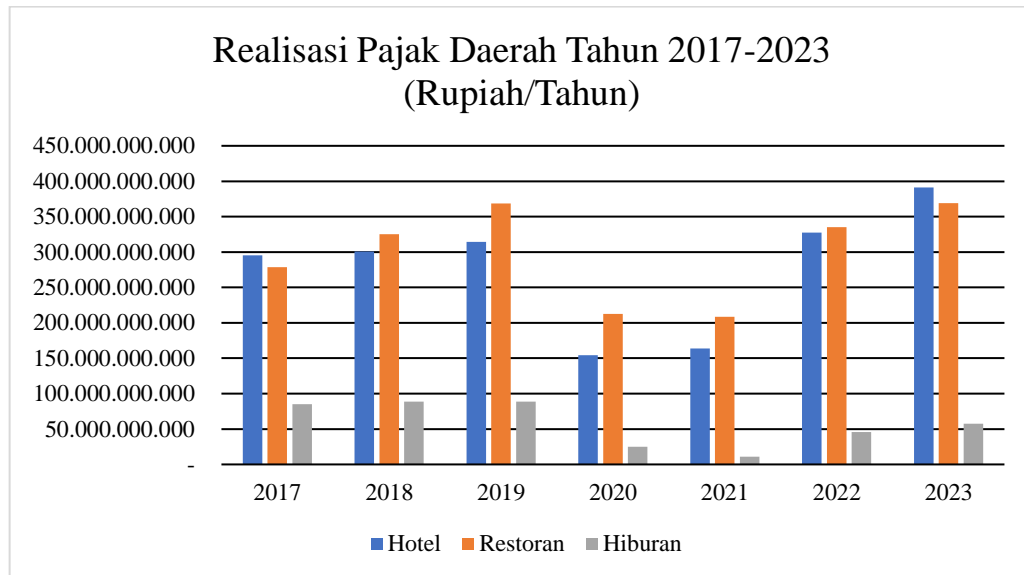
Keberhasilan pengembangan sektor pariwisata, berarti akan meningkatkan perannya dalam penerimaan daerah, dimana sektor pariwisata merupakan komponen utamanya dengan memperhatikan juga faktor-faktor yang

mempengaruhinya, seperti jumlah kunjungan wisatawan baik domestik maupun mancanegara, jumlah obyek wisata yang ditawarkan, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan.

Kota Bandung merupakan kota metropolitan terbesar di Jawa Barat sekaligus menjadi ibu kota provinsi. Kota Bandung juga merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya menurut jumlah penduduk. Kota Bandung hingga kini masih menjadi tujuan wisata bagi banyak wisatawan. Beragam jenis wisata tersedia di Kota Bandung seperti wisata belanja, wisata kuliner, wisata budaya, dan berbagai tempat wisata rekreasi dan alam. Letak Kota Bandung sendiri yang dekat dengan ibu kota Jakarta, kini bisa ditempuh hanya dengan waktu kurang lebih dua jam saja. Berbagai sarana transportasi umum bermunculan dan mempermudah akses untuk menuju atau keluar kota Bandung.

Pemerintah Kota Bandung memberikan perhatian bagi perkembangan kepariwisataan di Kota Bandung dengan tujuan memperoleh dampak positif dari industri pariwisata seperti jalan untuk menuju objek wisata yang tentunya akan berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat, dan menjadikan industri pariwisata sumber potensial bagi pemasukan pendapatan daerah. Dalam meningkatkan kemampuannya dalam bidang pendanaan untuk pembangunan, Kota Bandung berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemasukan pendapatan daerah dari sektor pariwisata berasal dari pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan berikut adalah kontribusi pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata tahun 2017-2023.

Gambar 1.1
Realisasi Pajak Daerah Tahun 2017-2023 (Rupiah/Tahun)



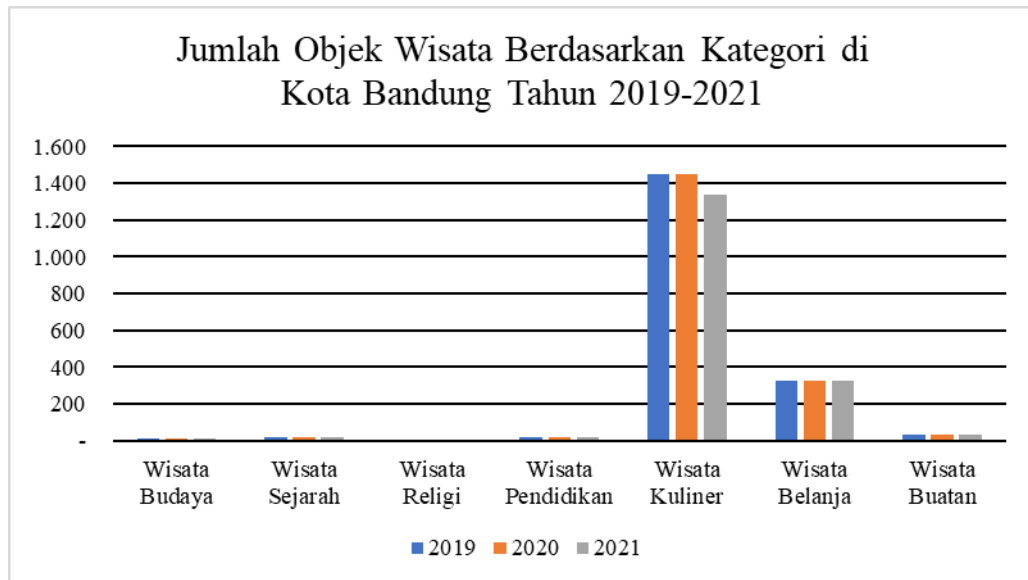
Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, 2023

Gambar 1.1 memperlihatkan data realisasi pajak hotel, restoran dan hiburan Kota Bandung tahun 2017-2022. Dimana pada tahun 2017 pajak hotel berkontribusi sebesar Rp.295.385.661.260, pada tahun 2018 terjadi peningkatan sebesar Rp.300.755.546.43 dan tahun 2019 pajak hotel mengalami peningkatan sebesar Rp.314.136.351.765. Pajak hotel pada tahun 2020 pajak hotel mengalami penurunan drastis sebesar Rp.154.422.542.379 penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Kemudian pada tahun 2021 sampai 2022 pajak hotel semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan dimana pada tahun 2021 sebesar Rp.163.856.465.266 dan tahun 2022 sebesar Rp.327.563.782.580. Hingga pada tahun 2023 pajak hotel mengalami kenaikan yang sangat signifikan sebesar Rp.391.209.042.397.

Sementara itu pajak restoran pada tahun 2017 sebesar Rp.278.760.056.903, terjadi peningkatan pada tahun 2018 sebesar Rp.325.361.592.033 dan tahun 2019 sebesar 368.643.347.205. Kemudian pada tahun 2020 sebesar Rp.212.685.094.158 dan 2021 sebesar Rp.208.579.096.307, tahun 2020-2021 pajak restoran mengalami penurunan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19. Kemudian tahun 2022 pajak hotel kembali mengalami peningkatan menjadi Rp.334.973.160.369, hingga pada tahun 2023 sebesar Rp.369.158.404.606.

Di sisi lain pajak hiburan mengalami pola yang serupa dengan pajak hotel dimana pada tahun 2017 pajak hiburan sebesar Rp.85.094.874.308, pada tahun 2018 sebesar Rp.88.856.425.387 dan tahun 2019 sebesar Rp.88.702.336.829. Sementara itu pada tahun 2020 sebesar Rp.24.780.208.424, tahun 2021 sebesar Rp.10.755.462.155 angka tersebut mengalami penurunan yang signifikan akibat pembatasan aktivitas selama pandemi, berbeda halnya dengan pajak lain yang perlahan mulai pulih, pajak hiburan pada tahun 2023 belum menunjukkan pemulihan yang kuat pada tahun-tahun berikutnya.

Gambar 1.2
Jumlah Objek Wisata Berdasarkan Kategori di Kota Bandung
Tahun 2019-2021



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Gambar 1.2 di atas menunjukkan bahwa objek wisata berdasarkan kategori di Kota Bandung pada tahun 2019-2021 wisata budaya, wisata sejarah, wisata religi, wisata pendidikan, wisata belanja dan wisata buatan tetap stabil pada angka yang sama. Sementara itu pada objek wisata kuliner pada tahun 2019-2020 tidak mengalami perubahan namun pada tahun 2021 objek wisata kuliner mengalami penurunan jumlah objek wisata kuliner hal itu disebabkan oleh adanya pandemi yang berdampak pada jumlah objek wisata kuliner.

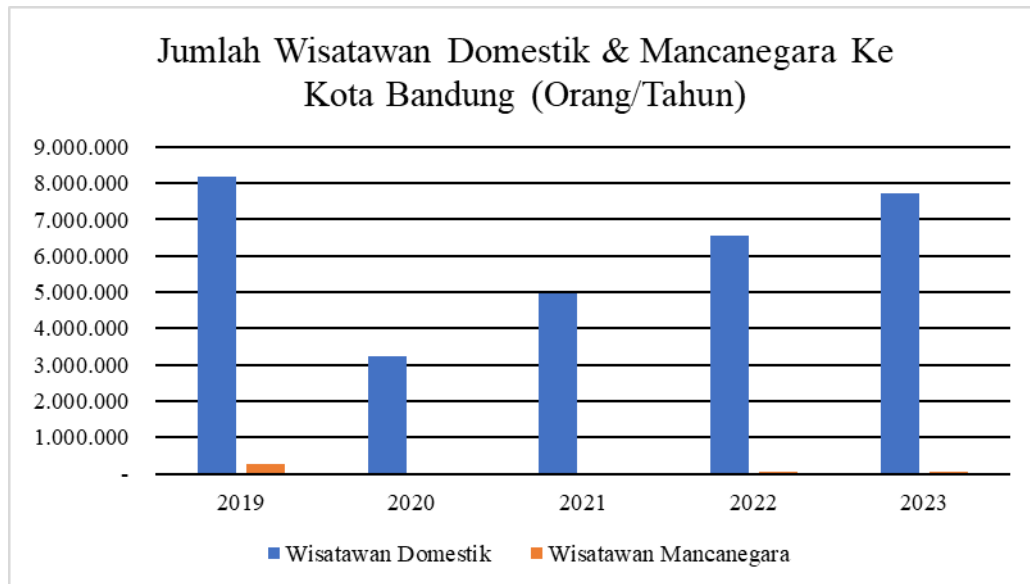
Peran sektor pariwisata perlu dioptimalkan agar dapat mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan cita rasa Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan lebih banyak lapangan kerja. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai misi pembangunan daerah yaitu dengan memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan

kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Strategi yang dapat dilaksanakan adalah dengan peningkatan kualitas sarana prasana, daya tarik dan atraksi atau *event* pariwisata di daerah melalui peningkatan kualitas sarana dan prasana kepariwisataan, pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata serta penguatan sumber daya manusia.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Lusiana *et al.*, 2021) menyatakan bahwa jumlah objek wisata berpengaruh positif signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Padang. Namun dalam hasil penelitian (Alyani & siwi, 2020) menyimpulkan bahwa jumlah objek wisata tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten/kota provinsi Sumatra Barat.

Kedatangan wisatawan menandakan bahwa adanya ketertarikan untuk mengunjungi objek wisata yang tersedia di daerah tersebut. Keanekaragaman budaya, keramah tamahan masyarakat, serta letak wilayah yang strategis juga menjadi faktor pendukung hadirnya wisatawan. Dengan meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan menunjukkan bahwa wisatawan/masyarakat yang berasal dari luar kota maupun mancanegara memberikan respon yang baik terhadap daerah tersebut. Seperti halnya Kota Bandung yang terletak di lokasi yang strategis menjadi daya dukung sektor pariwisata. Kemudahan dalam menjangkau objek-objek wisata yang berada di kota Bandung dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Berikut data jumlah kunjungan wisatawan di Kota Bandung:

Gambar 1.3
Jumlah Kunjungan Wisatawan Domestik & Mancanegara
Ke Kota Bandung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2023

Berdasarkan gambar 1.3 di atas menunjukkan bahwa perkembangan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Bandung selama 5 tahun terakhir dari tahun 2019 hingga 2023. Dimana pada tahun 2019 Kota Bandung menarik 8.175.221 wisatawan domestik dan 252.842 wisatawan mancanegara. Kemudian, pada tahun 2020 pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan drastis dalam jumlah wisatawan domestik menjadi 3.229.090 dan wisatawan mancanegara menjadi 3.021. Mulai tahun 2021, industri pariwisata mulai pulih dengan meningkatnya jumlah wisatawan domestik menjadi 4.973.649 dan wisatawan mancanegara menjadi 33.961. Tahun-tahun berikutnya, seperti tahun 2022 dan 2023, juga menunjukkan kenaikan stabil dalam jumlah wisatawan domestik dan mancanegara.

Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kota Bandung telah pulih dari dampak pandemi dan terus berkembang.

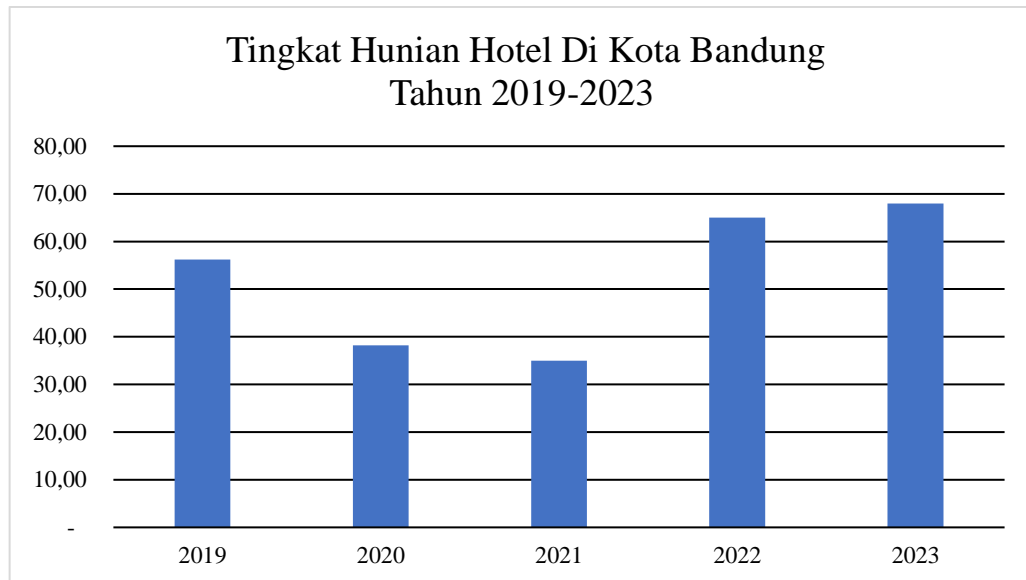
Perbandingan jumlah kunjungan wisatawan antara Kota Bandung dengan kota bogor yaitu dimana Kota Bandung dan Kota Bogor merupakan dua destinasi wisata utama di Jawa Barat yang menarik perhatian banyak pengunjung. Pada tahun 2023 Kota Bandung mencatat jumlah kunjungan sekitar 7,7 juta wisatawan, menjadikannya sebagai salah satu tujuan wisata terpopuler di kawasan ini. Dikenal dengan daya tariknya yang beragam, seperti tempat belanja, kuliner, serta keindahan alam seperti Tangkuban Perahu dan Kawah Putih, Bandung berhasil menarik minat wisatawan dari berbagai kalangan. Di sisi lain, Kota Bogor, yang terkenal dengan kebun raya dan wisata alam di puncak, menerima sekitar 5,6 juta kunjungan pada tahun yang sama. Meskipun jumlah kunjungan Bogor lebih rendah, kota ini tetap menjadi *favorite* bagi wisatawan, terutama yang berasal dari Jakarta. Dengan demikian, perbandingan antara kedua kota ini menunjukkan dinamika dan daya tarik masing-masing yang berbeda, serta potensi pengembangan sektor pariwisata di Jawa Barat.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Sofinaton Najjah, 2022) menyimpulkan bahwa jumlah kunjungan wisatawan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di provinsi sulawesi selatan. Namun penelitian (Widyaningsih & Budi, 2014) menyatakan bahwa jumlah kunjungan wisatawan tidak menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Gianyar.

Adapun jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik yang meningkat, maka secara teori tingkat hunian hotel juga ikut berpengaruh di kota Bandung. Hal tersebut dikarenakan banyaknya wisatawan yang bermalam di hotel atau akomodasi lainnya seperti losmen, wisma, dan lainnya (Tobing, 2021). Tingkat hunian hotel adalah suatu keadaan sampai sejauh mana jumlah kamar-kamar terjual, jika dibandingkan dengan seluruh jumlah kamar yang mampu untuk dijual.

Salah satu kebutuhan wisatawan selain atraksi wisata adalah kebutuhan untuk beristirahat. Bagi wisatawan yang datang dari luar daerah telah disediakan hotel, losmen dan penginapan untuk pengunjung yang ingin menginap. Hotel berfungsi bukan saja sebagai tempat menginap untuk tujuan wisata namun juga untuk tujuan lain seperti menjalankan kegiatan bisnis, mengadakan seminar atau sekedar mendapatkan ketenangan. Berbagai jenis hotel berbintang maupun melati menjadi pilihan bagi wisatawan untuk menikmati kunjungannya ke kota pariwisata. Berikut data tingkat hunian hotel di Kota Bandung:

Gambar 1.4
Tingkat Hunian Hotel di Kota Bandung Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2024

Berdasarkan gambar 1.4 tingkat hunian hotel di Kota Bandung dari tahun 2019-2023 dimana pada tahun 2019 tingkat hunian hotel di Kota Bandung tercatat sebesar 56,31%. Ini menunjukkan bahwa di tahun tersebut, sektor perhotelan di Kota Bandung mampu menarik cukup banyak pengunjung. Namun, pada tahun 2020-2021 mengalami penurunan yang cukup drastis disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang membatasi mobilitas dan aktivitas pariwisata. Kemudian pada tahun 2022 tingkat hunian hotel kembali meningkat mencapai 65% dan tahun 2023 tingkat hunian hotel terus meningkat hingga mencapai 68%. Ini mengisyaratkan bahwa sektor perhotelan di Kota Bandung diperkirakan semakin membaik dan mampu menjaring lebih banyak pengunjung di masa mendatang.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Olivia Maria Lintong, 2023) menyatakan bahwa tingkat hunian hotel berpengaruh signifikan terhadap

pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten bangkalan dan kabuapaten sumenep. Lain hal nya dengan peneltian yang dilakukan (Hesty Maharani, 2020) yang menyimpulkan bahwa tingkat hunian hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kabupaten karanganyar.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena. Pertama, jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun internasional, memiliki dampak langsung terhadap Pajak Daerah Sektor Pariwisata. Semakin banyak wisatawan yang berkunjung, semakin tinggi pula potensi pendapatan dari pajak dan retribusi pariwisata yang dapat diperoleh oleh pemerintah daerah. Kedua, keberadaan objek wisata yang beragam juga memainkan peran krusial dalam menarik minat pengunjung. Semakin banyak pilihan objek wisata yang tersedia, semakin besar kemungkinan untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Selain itu, tingkat hunian hotel menjadi indikator penting dalam industri pariwisata ketika tingkat hunian meningkat, pendapatan dari sektor akomodasi juga akan meningkat. Selanjutnya, lama tinggal wisatawan di Kota Bandung berhubungan langsung dengan pengeluaran mereka selama berwisata. Wisatawan yang tinggal lebih lama cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk berbagai kebutuhan seperti makanan, transportasi, dan kegiatan rekreasi. Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai perkembangan sektor pariwisata di Kota Bandung dan kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih

efektif untuk mengembangkan sektor pariwisata dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor prioritas utama dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah serta dapat meningkatkan kemandirian dan daya saing, dengan demikian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan daerah. Dalam penelitian ini diangkat tema tentang pendapatan asli daerah karena merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penerimaan pendapatan asli daerah. Selain itu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peningkatan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara ke kota bandung, yang berpotensi mempengaruhi pendapatan asli daerah sektor pariwisata. Selain itu terdapat variasi dalam tingkat hunian hotel dan pertumbuhan jumlah objek wisata yang belum di kelola secara optimal, serta pertumbuhan pola lama tinggal wisatawan yang berdampak pada pengeluaran mereka. Dengan demikian ini menciptakan tantangan dan peluang bagi pengembangan pariwisata di kota bandung, yang perlu di analisis lebih mendalam untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

Berdasarkan penjelasan diatas, bisa dikatakan bahwa sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang penerimaan daerah. Maka untuk mengetahui bagaimana pengembangan pariwisata dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan potensi pariwisata yang ada, maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENDORONG PENINGKATAN PAJAK DAERAH SEKTOR PARIWISATA KOTA**

BANDUNG DAN PERAMALAN PAJAK DAERAH SEKTOR PARIWISATA KOTA BANDUNG 2024-2034 DENGAN METODE ARIMA.”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah yang diambil dari penelitian ini adalah faktor apa yang dapat mempengaruhi pajak daerah sektor pariwisata di Kota Bandung dimana variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata, dan tingkat hunian hotel di Kota Bandung. Pengembangan sektor pariwisata menjadi salah satu fokus utama dalam peningkatan pajak daerah. Akan tetapi, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diteliti untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pajak daerah sektor pariwisata di Kota Bandung. Beberapa masalah diantaranya adalah jumlah kunjungan wisatawan yang meningkat atau menurun dapat berdampak terhadap pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, keberadaan berbagai objek wisata yang ada di Kota Bandung juga memainkan peran penting yang memungkinkan memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah kemudian tingkat hunian hotel dapat mencerminkan keefektifan sektor hotel dalam mendukung pendapatan pariwisata daerah dan terakhir lama tinggal wisatawan di Kota Bandung dapat mencerminkan seberapa besar pengeluaran yang dikeluarkan oleh wisatawan selama di Kota Bandung.

1.3 Batasan Masalah

Ruang lingkup yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini adalah beberapa faktor yang diujikan untuk mengetahui bahwa faktor tersebut berhasil dalam mempengaruhi pajak daerah sektor pariwisata atau tidak. Faktor tersebut diantaranya adalah jumlah kunjungan wisatawan, jumlah objek wisata dan tingkat hunian hotel. Faktor-faktor tersebut yang akan digunakan untuk menguji apakah terdapat pengaruh dalam meningkatkan atau menurunkan pajak daerah sektor pariwisata di Kota Bandung.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Bandung?
2. Bagaimana hasil peramalan pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung 2024-2034?
3. Bagaimana pemanfaatan Google Trends dalam memperkuat analisis hasil proyeksi pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perkembangan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara, jumlah objek wisata, tingkat hunian hotel dan lama tinggal wisatawan terhadap pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hasil peramalan pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung 2024-2034.
3. Untuk mengetahui pemanfaatan Google Trends dalam memperkuat analisis hasil proyeksi pajak daerah sektor pariwisata Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi akademisi

Penelitian ini diharapkan untuk membantu para peneliti melakukan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. khususnya, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah sektor pariwisata di Kota Bandung.

2. Manfaat bagi praktisi

Bagi pemerintah, diharapkan dapat membantu dalam menentukan kebijakan untuk dapat meningkatkan pajak daerah sektor pariwisata di Kota Bandung. sementara itu bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi masukan untuk meningkatkan dan melestarikan objek wisata yang ada di Kota Bandung, selain itu dapat memberikan manfaat bagi pihak hotel untuk meningkatkan keefektifan hunian hotel agar menjadi tujuan bagi wisatawan.